

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tantangan pendidikan di masa sekarang dan masa mendatang adalah menyiapkan tenaga kerja dalam jumlah dan mutu yang sesuai dengan kebutuhan berbagai sektor, khususnya sektor industri dan jasa. Apalagi kita memasuki era globalisasi yang kompetitif dalam berbagai bidang kehidupan (politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya). Untuk itu, tampaknya pandangan kepada pendidikan kejuruan saat ini menjadi sangat penting, mengingat tuntutan sumber daya manusia (SDM) di pasaran yang harus memiliki kualitas. Untuk menyiapkan lulusan SMK yang memenuhi kualifikasi dan dibutuhkan pasar kerja, adalah dengan meningkatkan kompetensi lulusan. Konsekuensinya, dalam proses belajar siswa harus lebih banyak mendapat kesempatan untuk mengasah keterampilannya. Bukan hanya saat praktek di sekolah, juga yang paling besar pengaruhnya adalah ketika siswa melakukan praktek kerja di industri (Prakerin), karena dalam Prakerin benar-benar dapat melatih siswa untuk bekerja sesuai dengan tuntutan industri, baik dari sisi keterampilan maupun etos kerjanya. Untuk itu, Direktorat Dikmenjur (2002) mencanangkan program pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang mencakup 8 bidang keahlian, yaitu Pertanian, Pariwisata, Bangunan, Elektro, Mesin, Bisnis dan Manajemen, Seni Pertunjukan dan Kelautan.

Pendidikan kejuruan pada gilirannya harus mampu berperan dalam mempersiapkan siswa yang mampu bertindak, belajar dan mengatur masa depannya secara aktif dan mandiri. Terbentuknya siswa yang memiliki akhlak

mulia, bersikap kreatif dan inovatif, memiliki jiwa kewirausahaan yang tangguh, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, bertanggung jawab, berdisiplin dan mempunyai keterampilan serta menguasai IPTEK. Masalah utamanya, meskipun para pengambil keputusan pendidikan sudah banyak mengetahui kekurangan yang ada, namun tidak mudah untuk melakukan perubahan pendidikan secara cepat. Tidak heran jika institusi pendidikan kita seperti kurang begitu responsif terhadap perkembangan. Sekolah masih berjalan dengan sekadarnya saja mengikuti rutinitas yang ada, tanpa usaha kreatif untuk keluar dari kebiasaan.

Melihat situasi demikian, terdapat suatu akibat yang harus dihadapi oleh SMK, yaitu kurang terserapnya lulusan yang ada ke dalam sektor usaha formal ataupun informal. Ini karena SMK dan sekolah pada umumnya kurang memiliki relevansi dengan kebutuhan dunia kerja. Praktek kerja industri yang dilakukan masih sekadar untuk memenuhi pesan kurikulum dan dalam prakteknya kurang terkait dengan peningkatan kualitas kemampuan siswa, dalam hal ini terbentuknya sikap kewirausahaan. Memang tidak semua praktek yang dilakukan siswa SMK di luar jalur keterampilan yang diharapkan. Tetapi, persentasenya tidak lebih dari dua puluh persen (20 %) dari seluruh SMK yang ada di Indonesia (<http://prismasanjaya-srg.sch.id/htm/prakerin-1.htm>). Hal ini juga terbukti dari hasil survei awal terhadap 15 orang alumni SMK, yang menunjukkan bahwa siswa yang telah mengikuti program Praktek Kerja Industri terbagi ke dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama, siswa (alumni) telah memiliki sikap kewirausahaan dan berani untuk mencoba melakukan usaha, namun jumlahnya masih sedikit dan masih bersifat meneruskan usaha keluarga. Kelompok kedua, siswa telah memiliki bekal sikap wirausaha tetapi baru sebatas kepada ketertarikan dan minat, belum

berani mencoba untuk mengaplikasikannya. Kelompok ketiga, alumni tersebut baru memiliki pengetahuan tentang kewirausahaan saja dengan kata lain belum memiliki sikap kewirausahaan.

Mengacu pada ketiga kelompok tersebut, maka pihak sekolah harus memikirkan lebih jauh, dan bekerja sama dengan masyarakat (industri) berkaitan dengan kebutuhan industri dalam meningkatkan kualitas kemampuan siswa dalam hubungan dengan kualifikasi dalam merekrut tenaga kerjanya. Sehingga pada akhirnya antara sekolah dan industri akan memiliki kesamaan tujuan, dan lulusannya akan memiliki standar kompetensi minimum yang diperlukan oleh industri. Namun, selama ini mutu pendidikan masih belum mencapai harapan yang optimal, salah satunya karena masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung terwujudnya pendidikan yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang siap kerja (*able to job*) dan profesional.

Dengan melihat fenomena yang ada dari jumlah lulusan berdasarkan tamatan lulusan yang dihasilkan, yang salah satunya dari SMK untuk tingkat SLTA. Ternyata lulusan tingkat SLTA yang termasuk juga SMK, menunjukkan jumlah pengangguran yang tinggi.

Tabel 1.1
Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2001-2004

No	Pendidikan yang Ditamatkan	2001	2002	2003	2004
1.	Tidak tamat SD	851 426	868 308	1 036 048	1 004 296
2.	SD	1 893 565	2 353 330	2 452 805	2 275 281
3.	SLTP	1 786 317	2 146 495	2 426 393	2 690 912
4.	SLTA	2 933 490	3 244 130	3 456 099	3 695 504
5.	Diploma I/II	-	86 567	79 583	92 788
6.	Akademi/Diploma III	251 134	163 859	123 226	144 463
7.	Universitas	289 099	269 415	245 857	385 418
	Total	5 813 231	9 132 104	9 820 011	10 251 351

Sumber: Survei Tenaga Kerja Nasional 2001, 2002, 2003, dan 2004

Depnakertrans memprediksi jumlah pengangguran tahun 2003-2009 secara total, sebagai berikut:

Tabel 1.2

Prediksi Jumlah Pengangguran Tahun 2003-2009

Tahun	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Jumlah	11.359	11.630	11.630	11.100	10.287	9.118	7.547
% (thd angk. kerja)	11,0	11,0	10,8	10,8	9,2	8,0	5,5

Sumber: Levi Silalahi, Depnakertrans

Lulusan yang tidak terserap lapangan kerja formal dan informal, otomatis menganggur. Orang tidak bekerja atau pengangguran merupakan masalah bangsa yang tidak pernah selesai. Ada tiga hambatan yang menjadi alasan kenapa orang tidak bekerja, yaitu hambatan kultural, kurikulum sekolah, dan pasar kerja. Hambatan kultural yang dimaksud adalah menyangkut budaya dan etos kerja. Sementara yang menjadi masalah dari kurikulum sekolah adalah belum adanya standar baku kurikulum pengajaran di sekolah yang mampu menciptakan dan mengembangkan kemandirian SDM yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sedangkan hambatan pasar kerja lebih disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM yang ada untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja.

Ekonomi abad ke-21, yang ditandai dengan globalisasi ekonomi, merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, yang terjadi di negara-negara di seluruh dunia dalam satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi yang sudah pasti dihadapi oleh bangsa Indonesia menuntut adanya efisiensi dan daya saing dalam dunia usaha, yang pada saat ini

Indonesia berada pada peringkat ke-92 dari 108 negara yang disurvei (*World Economic Forum*). Kita tidak bisa mengingkari bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan tercapainya efisiensi dan daya saing dalam dunia usaha tersebut. Namun, pada kenyataannya menurut *World Competitiveness Report* pendidikan di Indonesia menempati urutan ke-45 atau terendah dari seluruh negara yang diteliti, di bawah Singapura (8), Malaysia (34), Cina (35), Filipina (38), dan Thailand (40). (<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0306/13/opi01.html>)

Berkaitan dengan masalah pendidikan (SMK) dan adanya permasalahan tingginya jumlah pengangguran dan rendahnya tingkat kompetisi Indonesia, mengacu pada hasil penelitian Sunaryo (1996, <http://pk.ut.ac.id/jp/12tibe.htm>) yang menunjukkan bahwa:

Tanggapan dunia industri dalam rangka program *link and match* pada indikator penyusunan program, penyusunan, kurikulum, dan pelaksanaan pendidikan cukup positif dan cenderung bersedia terlibat langsung. Namun, kesediaan industri dalam evaluasi dan pemasaran lulusan cenderung rendah. Hal ini karena mereka merasa kurang kompeten pada bidang evaluasi, sedangkan pemasaran lulusan merupakan suatu masalah rumit karena terjadi ketidakseimbangan antara besarnya lulusan dengan daya tampung dunia industri untuk tenaga kerja.

Selama ini, praktek kerja memang sudah menjadi salah satu persyaratan kompetensi yang harus dilalui siswa SMK. Sayangnya, tidak banyak dunia industri di dalam negeri yang mau menerima siswa untuk melakukan praktek kerja. Kalaupun ada, praktek kerja yang disediakan sering kali kurang sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa SMK. Padahal dunia usaha dan industri dapat menyerap lulusan SMK yang sudah terlatih baik tanpa perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk memberikan pelatihan. Kalaupun ada biaya atau upah tenaga

kerja yang harus dikeluarkan, maka besarnya pun tidak sebesar jika mempekerjakan pekerja.

Berikut ini merupakan masalah yang membuat peningkatan mutu pendidikan tidak berjalan:

1. akuntabilitas sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat masih sangat rendah;
 2. penggunaan sumber daya tidak optimal;
 3. partisipasi masyarakat masih rendah; dan
 4. sekolah tidak mampu mengikuti perubahan yang terjadi di lingkungannya.
- (Sidi, 2001:31-33).

Dari keempat hal di atas, dapat kita lihat bahwa pendidikan di negara kita belum melakukan upaya secara optimal. Sudah saatnya mengoptimalkan keempat hal tersebut dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Sehubungan dengan SMK, maka mutu pendidikan dalam hubungannya dengan mutu lulusan yang dapat terserap ke dalam dunia kerja. Mutu pendidikan berhubungan dengan apa yang dihasilkan dan siapa pemakainya. Hal tersebut merujuk pada nilai tambah yang diberikan oleh pendidikan, dan pihak-pihak yang memproses serta menikmati hasil-hasil pendidikan (Idochi Anwar, 2004:51). Upaya menuju terbentuknya lulusan yang memiliki kompetensi dengan mutu yang baik, dalam upayanya adalah dengan memberikan suatu program yang dinamakan dengan Prakerin (Praktek Kerja Industri). Sehingga pendidikan, khususnya pendidikan bisnis, ditunjang dengan pelatihan menuju kepada terbentuknya siswa yang memiliki sikap mandiri, yang tidak hanya mampu memasuki dunia kerja (sektor usaha) formal, tetapi juga mau bahkan mampu menciptakan lapangan kerjanya sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Thomson (1973), bahwa pendidikan kejuruan

merupakan “education designed to develop skill, abilities, understanding, attitudes, work habits, and appreciations needed by workers to enter and make progress in employment on useful and productive basis”. Hal tersebut menyatakan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang dirancang untuk mengembangkan keahlian, kemampuan, pemahaman, sikap, kebiasaan kerja, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjadi pekerja yang berguna dan produktif. Sejalan dengan kondisi negara sekarang ini, juga berkaitan dengan upaya memenangkan persaingan dalam pasaran kerja, bahkan sampai pasar kerja di luar negeri.

Melalui Forum Rakernas Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional (MPKN) pada 13 Juni 2005, Dirjen Dikdasmen Depdiknas Indra Djati Sidi memberikan masukan-masukan untuk dapat menciptakan Sekolah Menengah Kejuruan yang berstandar internasional, sehingga lulusannya dapat terserap lapangan kerja dengan kualitas yang memadai. Berdasar pada himbauan tersebut, sudah seharusnya lembaga pendidikan (SMK) melakukan persiapan untuk melahirkan lulusan-lulusan yang berkualitas dalam hubungannya dengan keterserapan ke dalam dunia kerja.

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pada SMK merupakan proses pembelajaran dan bimbingan di sekolah, dan proses pelatihan kerja di sektor industri yang sesungguhnya. Proses pembelajaran di sekolah terutama bertujuan untuk membekali siswa dalam mengembangkan kepribadian, potensi akademik dan dasar-dasar keahlian yang kuat dan benar melalui pembelajaran program normatif, adaptif dan produktif. Sedangkan program pelatihan kerja bertujuan untuk membekali siswa menguasai kompetensi keahlian produktif terstandar,

menginternalisasi sikap-nilai, dan budaya industri yang berorientasi pada standar mutu, nilai-nilai ekonomi, kritis, produktif dan kompetitif serta jiwa kewirausahaan.

Upaya membekali dan membentuk siswa yang memiliki sikap kewirausahaan melalui pendidikan bisnis di sekolah dan pelatihan kerja industri pada sektor industri nyata, sebagai konsep nyata berlakunya Otonomi Daerah yang mendorong adanya partisipasi masyarakat yang salah satunya adalah masyarakat industri.

Dalam memahami tujuan dari pendidikan bisnis, dan optimalisasinya melalui pelatihan (praktek) kerja industri dalam upaya menumbuhkan sikap kewirausahaan. Maka proses pendidikan dan pelatihan tersebut, tidak terlepas dari adanya proses pembelajaran. Baik di sekolah maupun di sektor industri. Namun, berkaitan dengan itu, untuk mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan yang dapat membentuk siswa yang berkualitas, tidak terlepas dari aspek pengelolaan sekolah dalam kerjasamanya dengan industri. Dalam hal ini manajemen sekolah, dan manajemen perusahaan (industri) akan sangat menentukan.

Pendidikan bisnis dan optimalisasinya melalui pelatihan kerja industri merupakan suatu proses belajar. Pendidikan bisnis dilakukan di sekolah, tentunya sangat ditentukan oleh kualitas pembelajaran yang diberikan oleh guru di sekolah. Namun pendidikan bisnis akan dapat diberikan dengan optimal, jika siswa dapat merasakan lingkungan kerja secara langsung. Hal ini mengindikasikan bahwa belajar tidak terlepas dari lingkungan. Seperti yang dikemukakan oleh Burton (1962:13) bahwa “belajar adalah suatu perubahan dalam diri individu sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya”.

Berdasar pada latar belakang di atas, maka penulis berpendapat bahwa pendidikan bisnis dan pelatihan (praktek) kerja industri akan terlaksana secara optimal (tercapai target terbaik) dengan melakukan kerjasama antara pihak sekolah dan pihak perusahaan (industri). Penelitian ini dilakukan untuk melihat sampai sejauh mana peran keduanya dalam hal pengelolaan program prakerin tersebut dalam upaya mengoptimalkan terbentuknya sikap kewirausahaan siswa SMK. Mengacu pada hal itu, peneliti berkeinginan untuk meneliti: **Pembentukan Sikap Kewirausahaan Siswa dengan Mengoptimalkan Pendidikan Bisnis melalui Program Praktek Kerja Industri di SMKN I Tarogong Kidul Garut.**

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Pendidikan Sistem Ganda (PSG) dilakukan di dua tempat (sekolah dan industri) yang pada pelaksanaannya bertolak pada peran keduanya dalam menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dengan salah satu tujuan siswa memiliki sikap kewirausahaan. Untuk mencapainya, maka dilaksanakan program praktek kerja industri. Dalam penyelenggaraannya banyak aspek yang dipersiapkan, yaitu dasar-dasar pendidikan bisnis di sekolah, guru yang kompeten, fasilitas sekolah, daya dukung personil sekolah dan lingkungan sekitar, dan banyak aspek lainnya yang ikut menentukan keberhasilan pendidikan di SMK, khususnya pada pelaksanaan program praktek kerja.

Berdasar pada uraian dan latar belakang di atas, maka penelitian ini dibatasi pada fokus masalah "bagaimana pelaksanaan program praktek kerja industri yang dilakukan dalam upaya mengoptimalkan pendidikan bisnis di sekolah, dengan tujuan membentuk sikap kewirausahaan siswa".

Adapun rumusan masalahnya, sebagai berikut:

1. Bagaimana pembelajaran yang dilakukan dalam upaya membentuk sikap kewirausahaan siswa?
2. Bagaimana pengelolaan program Prakerin di sektor industri oleh pihak manajemen sekolah dalam upaya membentuk sikap kewirausahaan siswa?
3. Bagaimana pengelolaan program Prakerin di sektor industri oleh pihak manajemen perusahaan dalam upaya membentuk sikap kewirausahaan siswa?
4. Sejauh mana optimalisasi pendidikan bisnis yang dilakukan sekolah melalui pelatihan di sektor industri dalam membentuk sikap kewirausahaan siswa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembelajaran yang dilakukan dalam upaya membentuk sikap kewirausahaan siswa.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan program Prakerin di sektor industri oleh pihak manajemen sekolah dalam upaya membentuk sikap kewirausahaan siswa.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan program Prakerin di sektor industri oleh pihak manajemen perusahaan dalam upaya membentuk sikap kewirausahaan siswa.
4. Untuk mengetahui sejauh mana optimalisasi pendidikan bisnis yang dilakukan sekolah melalui pelatihan di sektor industri dalam membentuk sikap kewirausahaan siswa.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan temuan secara empirik yang memberikan gambaran mengenai upaya mengoptimalkan pendidikan bisnis didukung dengan pelatihan kerja industri dengan tujuan terbentuknya sikap kewirausahaan pada siswa.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan yang berguna bagi pihak sekolah dan perusahaan tempat dilakukannya Prakerin, sehubungan dengan peningkatan kinerja yang mungkin dapat dilakukan dalam pelaksanaan prakerin. Selain itu, dapat memberikan gambaran sejauh mana pembentukan sikap kewirausahaan dapat menunjang terhadap terwujudnya pendidikan yang bermutu. Lebih jauhnya dapat menjadi bahan untuk pengembangan model program Prakerin.

E. Kerangka Pemikiran

Dengan semakin ketatnya tingkat persaingan antar negara, muncul berbagai tantangan yang berkaitan dengan masalah kualitas sumber daya manusia. Keadaan ini menghadapkan dunia pendidikan pada suatu tugas yang lebih berat untuk mempersiapkan dan menjawab segala tantangan tersebut. Salah satu dunia pendidikan tersebut adalah berada pada lembaga pendidikan formal menengah kejuruan (SMK), yang secara khusus memiliki kewajiban dan dituntut untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Dalam artian lulusan yang siap memasuki dunia kerja. Namun, mempersiapkan lulusannya pada tingkat kesiapan tersebut

tidaklah mudah. Berbagai proses pendidikan dan pelatihan harus dilalui guna mencapai kompetensi yang diharapkan.

Proses yang dilalui pun tidak bisa dilakukan dengan mudah. Dalam proses pendidikan menengah kejuruan yang mengacu kepada Pendidikan Sistem Ganda, mengharuskan adanya keterlibatan dari dunia usaha (industri). Mengingat pendidikan bisnis (*vocational*) yang diberikan di sekolah tidak cukup untuk membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan sikap sebagai seorang calon tenaga kerja. Maka sekolah kejuruan memerlukan tempat pelatihan sebagai sarana pembentukan sikap siswa yang siap kerja (*able to job*) dan memiliki sikap kewirausahaan. Pembentukan sikap kewirausahaan selain perlu untuk membentuk siswa yang akan memasuki instansi tertentu, diharapkan juga siswa mau dan mampu membuat lapangan kerjanya sendiri.

Keterpaduan antara pendidikan di sekolah dengan tuntutan di lapangan pun pada akhirnya menuntut pihak sekolah harus bersikap proaktif dalam sistem pengelolaan (manajemen) sekolahnya. Dalam hal ini sekolah bersikap proaktif melakukan penelitian atau pemantauan serta melakukan kerja sama dengan dunia usaha (industri), asosiasi profesi, dan masyarakat lainnya, untuk dapat membuat perencanaan yang berkaitan dengan upaya membekali siswanya dengan kompetensi sesuai dengan program keahlian masing-masing.

Salah satu program pembelajaran yang mampu memberikan kompetensi tersebut dikenal dengan sebutan program Praktek Kerja Industri, yang mengarah kepada penanaman sikap kemandirian siswa. Dalam proses pembelajarannya, siswa diberikan bekal pengalaman di lapangan dengan harapan dapat menularkan pengetahuan, sikap mental, dan keterampilan wirausaha dari dunia usaha (industri)

kepada siswa. Sehingga dapat membentuk sikap kemandirian siswa dalam menghadapi kondisi yang ada setelah mereka lulus, bahkan siswa memiliki keinginan untuk membuka usaha sendiri atau berwirausaha.

Rincian kerangka berpikir dalam permasalahan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Sikap kewirausahaan

Kewirausahaan muncul dari kata wirausaha (usaha sendiri). Kewirausahaan merupakan terjemahan dari *entrepreneurship*, sedangkan wirausaha terjemahan dari *entrepreneur*. Perbedaan keduanya adalah bahwa *entrepreneur* merupakan orang yang inovatif, antisipatif, inisiatif, pengambilan risiko, dan berorientasi laba (Kao, 1991:14). Sedangkan *entrepreneurship* merupakan suatu kemampuan (*ability*) dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar, sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, dan proses dalam menghadapi tantangan hidup (Suryana, 2003:10).

Berdasar pada hal tersebut, maka inti dari pribadi wirausaha adalah pribadi yang memiliki sikap dan tingkah laku yang unggul. Sesuai dengan itu, terdapat ciri sekaligus sebagai sikap dari kewirausahaan seperti yang dikemukakan Meredith dalam Suryana (2003:14), sebagai berikut:

- a. Percaya diri, keyakinan, ketidaktergantungan, individualitas, dan optimisme;
- b. Berorientasi pada tugas dan hasil, kebutuhan untuk berprestasi, berorientasi laba, ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energik dan dinamis;
- c. Pengambilan risiko dan suka tantangan, kemampuan untuk mengambil risiko yang wajar;
- d. Kepemimpinan, perilaku sebagai pemimpin, bergaul dengan orang lain, menanggapi saran-saran dan kritik;
- e. Keorisinilan, inovatif dan kreatif serta fleksibel; dan
- f. Berorientasi ke masa depan, pandangan ke depan, perspektif.

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap dan perilaku kewirausahaan, yaitu faktor internal (hak kepemilikan, kemampuan atau kompetensi, serta insentif) dan eksternal (lingkungan). David McClelland (dalam Suryana, 2003:39) mengemukakan bahwa “kewirausahaan (*entrepreneurship*) ditentukan oleh motif berprestasi (*achievement*), optimisme (*optimism*), sikap-sikap nilai (*value attitudes*) dan status kewirausahaan atau keberhasilan.

Berdasar pada berbagai pendapat di atas, maka sikap kewirausahaan dalam penelitian ini lebih mengacu kepada sikap kemandirian siswa dalam berusaha, kreativitas, keinovasian, tanggung jawab, dan orientasi untuk selalu berprestasi.

2. Pendidikan Bisnis

Mengacu pada pendapat Lyon (dalam Alma,1992:4) yang memberikan definisi bahwa “Pendidikan bisnis adalah setiap bentuk pendidikan yang dialami oleh *businessman*, yang membuat ia menjadi lebih baik, apakah pendidikan itu diterimanya di dalam kelas ataupun tidak”. Walaupun pada kenyataannya definisi ini tidak memuaskan guru di sekolah. Menurut mereka hanya pengetahuan tertentu saja yang dapat diberikan di sekolah, dan pengetahuan lainnya dapat diperoleh di luar sekolah. Dalam hal ini berarti bahwa pendidikan dilakukan di sekolah, dan pelatihan dilakukan di luar sekolah pada sektor industri nyata.

Pendidikan (umum) memiliki tujuan utama untuk membantu penyesuaian individu terhadap lingkungannya secara umum, maka pendidikan bisnis bertujuan untuk penyesuaian individu dengan lingkungan bisnis.

Dalam pembelajarannya, pihak sekolah (guru) mendidik siswa dalam bisnis, sekaligus menjadikannya sebagai warga negara yang baik, yang bijaksana dan bertanggung jawab di bidang ekonomi dan lainnya. Dalam prosesnya pun

harus selalu menghubungkan dengan upaya pembentukan watak dan etika yang mengutamakan kejujuran dan tanggung jawab. Sehingga lulusannya tidak hanya mempunyai kompetensi akademik dan praktis saja, tetapi juga kompetensi moral. Sehingga nantinya siswa menjadi warga negara yang mengerti keadaan ekonomi bangsa, dan sebagai konsumen yang pandai dalam melakukan kegiatan konsumsinya secara pribadi.

Pendidikan bisnis pada penelitian ini berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan yang mempersiapkan siswa memperoleh bekal pengetahuan dasar mengenai unsur-unsur dalam lingkungan bisnis yang ditetapkan sesuai program bidang keahliannya. Dengan kata lain memberikan mata diklat tertentu yang nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan di dunia usaha (industri). Misalnya bidang keahlian bisnis dan manajemen pada program keahlian akuntansi. Pendidikan bisnis yang diberikan pada program keahlian akuntansi melalui mata diklat produktif (mengerjakan persamaan akuntansi, mengelola bukti transaksi, mengelola jurnal, dan sebagainya). Pemelajaran mata diklat produktif dilaksanakan di sekolah, dan optimalisasinya melalui mata diklat produktif di sekolah dan di industri, yang sering kita sebut Pendidikan Sistem Ganda (PSG).

Dari uraian di atas, dapat disebutkan bahwa tujuan pendidikan bisnis (dasar) secara luas mengembangkan tiga bidang kompetensi ekonomi yang berhubungan dengan dasar-dasar ekonomi, dengan bisnis, dan dengan pribadi.

Pendidikan bisnis dapat mencapai tingkat optimal dengan adanya dukungan manajemen sekolah. Dalam hal ini pihak yang terkait seperti kepala sekolah dan

guru menjadi sangat mempengaruhi terhadap terwujudnya tujuan dari pendidikan, khususnya pendidikan kejuruan.

Hal tersebut di atas, berdasarkan pada asumsi bahwa optimalisasi, bisa terwujud dengan adanya optimalisasi pemanfaatan sumber daya pendidikan yang melibatkan berbagai proses atau fungsi dan administrasi pendidikan. Engkoswara dalam Anwar (2004:82) mengatakan bahwa proses dibagi atas perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan (pengawasan). Proses tersebut merupakan wilayah administrasi pendidikan terhadap sumber daya pendidikan yang mencakup siswa, guru, dan sebagainya; sumber belajar; dan fasilitas pendidikan. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan pun menjadi sangat menentukan terhadap optimalisasi pendidikan bisnis yang dilakukan.

Optimalisasi yang berarti sebagai pengoptimalan, dan pengoptimalan berarti sebagai proses, cara, perbuatan mengoptimalkan. Dalam penelitian ini mengartikan optimalisasi sebagai suatu tingkat pencapaian dari target maksimal yang telah ditetapkan oleh suatu program, yang pencapaiannya ditentukan oleh upaya maksimal dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program. Optimalisasi tercapai dengan adanya pemanfaatan sumber daya pendidikan yang melibatkan berbagai proses atau fungsi dan administrasi pendidikan. Optimalisasi pendidikan bisnis di sekolah terwujud melalui program praktik kerja yang merupakan prasyarat diperolehnya kompetensi dan diakuinya lulusan SMK sebagai calon tenaga kerja.

3. Pembelajaran pada Praktek Kerja Industri

Pelatihan sebagai wahana pendidikan di luar sekolah atau di lingkungan industri nyata. Pelatihan juga sebagai suatu proses pembelajaran seseorang atau

kelompok untuk meningkatkan kemampuan atau perilaku (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) untuk mencapai suatu tujuan. (Suherman, 1998:32). Sehingga pelatihan bisa optimal jika komponen proses pembelajarannya pun optimal sehubungan dengan manajemen pengelolaan sekolah yang meliputi tahapan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan (evaluasi), ditunjang dengan manajemen perusahaan berkaitan dengan penunjukan instruktur pelatihan dan lingkungan industri yang kondusif dalam upaya membantu mengembangkan potensi yang dimiliki peserta pelatihan (siswa).

Untuk merespon kebutuhan pasaran kerja, sistem pendidikan dan pelatihan ke arah itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Ini berkaitan dengan kemampuan dalam menghasilkan SDM yang berkualitas setara dengan standar nasional, bahkan saat ini harus setara dengan standar internasional untuk dapat bersaing. Dalam hubungannya dengan standar kompetensi sebagai suatu pernyataan (*statement*) tentang kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk melakukan pekerjaan di tempat kerja berikut patokan kinerja yang diharapkan. Maka dalam menetapkan standar kompetensi sistem pendidikan dan pelatihan dari persekolahan harus disepakati oleh para calon pengguna program diklat tersebut, dengan kata lain kompetensi-kompetensi yang ditetapkan harus mengidentifikasi praktik-praktek di tempat kerja nyata.

Pelatihan yang dilakukan di tempat kerja nyata, harus senantiasa meliputi beberapa aspek. Hal ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Aspek tersebut di antaranya:

a. Pembelajaran

Berdasarkan pada pendapat Komaruddin (2000:179) yang mengartikan bahwa “dalam bahasa Inggris pembelajaran disebut dengan *learning*, yaitu suatu kegiatan untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman atau keterampilan (termasuk penguasaan kognitif, afektif dan psikomotor) melalui studi, pengajaran atau pengalaman.” Ini berarti pembelajaran merupakan proses dari belajar, sebagai proses perubahan perilaku yang dihasilkan dari pengalaman. Perubahan yang terjadi tentunya tidak bisa terlepas dari interaksinya dengan lingkungan. Sehingga untuk mengoptimalkan pendidikan dilakukan suatu upaya yang dapat mengkondisikan siswa untuk dapat berinteraksi dengan lingkungannya secara langsung. Lingkungan yang dijadikan tempat pun tidak hanya mencakup lingkungan bisnis, tetapi juga lingkungan masyarakat secara umum. Menghubungkannya dengan kecenderungan globalisasi, maka dunia pendidikan dituntut untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan baru yang tumbuh. Pendidikan yang senantiasa melakukan transformasi dan pembaruan sehingga menjadi tanggap terhadap segala perubahan.

Pada akhirnya, pembelajaran yang dilakukan bertujuan pada penguasaan kompetensi perilaku yang utuh (unjuk kerja). Hal ini sejalan dengan pemikiran dari Schippers (1993:23), bahwa “kompetensi perilaku merupakan prasyarat untuk meraih keberhasilan dalam berkarya dan berkiprah melalui prestasi dan kinerja yang optimal, yang pada gilirannya akan meningkatkan standar hidup”.

Pembentukan kompetensi sikap dan perilaku siswa SMK melalui pelatihan, akan bertujuan berorientasi pada terbentuknya kompetensi spesialisasi dan kompetensi penunjang. Kompetensi kejuruan yang termasuk pada kompetensi

spesialisasi, meliputi: kompetensi profesi, metode, sosial, dan kompetensi belajar. Sedangkan kompetensi penunjang meliputi: segala kemampuan untuk memahami dan memperhatikan organisasi, teknologi serta aspek ekonomi dan ekologi; teknik operasional; serta kepribadian dan kemasayarakatan.

Pada akhirnya, dengan adanya pelatihan di lingkungan industri (masyarakat), akan menjadikan siswa sebagai pribadi yang utuh. Namun tentunya pelatihan harus ditunjang dengan fasilitas dan sarana, materi pembelajaran yang menekankan pada praktik kerja, metode pembelajaran yang tepat untuk pelatihan, dan adanya evaluasi yang dapat menilai dan mengukur sejauh mana tujuan dapat dicapai.

b. Pembimbing (instruktur) pelatihan dari pihak industri

Pelatihan adalah proses pembelajaran, sehingga siswa memerlukan bimbingan dari orang yang lebih mampu (berpengalaman). Kecakapan dari instruktur sangat menentukan keberhasilan pelatihan. Sehingga instruktur yang dijadikan pembimbing harus memiliki kemampuan yang baik. Dalam hal ini Wena (1996:83) menyatakan bahwa instruktur “ a) betul-betul terampil dan memahami segala aspek di bidang kerjanya; b) memahami metodologi pembelajaran pelatihan; c) memiliki sifat telaten dan tekun dalam membimbing siswa; dan d) memahami psikologi pembelajaran.” Selanjutnya dikatakan bahwa instruktur bertugas untuk merancang program pembelajaran pelatihan, membimbing siswa, serta mengevaluasi kemajuan belajar siswa.

c. Lingkungan industri

Keterpaduan antara lingkungan sekolah dan lingkungan industri yang secara nyata berbeda bagi siswa, merupakan sarana dalam menghasilkan

lulusan yang baik dalam artian memahami dunia kerja. Ini selaras dengan misi SMK, untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja, memperkenalkan siswa dengan dunia nyata. Pelatihan kerja merupakan salah satu upaya untuk memperkenalkan siswa dengan dunia kerja yang nyata.

Lingkungan industri yang dipilih untuk mengembangkan potensi siswa, harus dapat mewujudkan lingkungan kerja sebagai lingkungan belajar bagi siswa; adanya keterhubungan antara pelatihan yang dilakukan dengan pengajaran di sekolah; melibatkan siswa sebagai pekerja dengan tanggung jawabnya bersama-sama dengan karyawan lain, sehingga dapat terbina hubungan antara siswa dengan instrukturnya maupun dengan karyawan lainnya.

Oleh karena lingkungan industri sangat mempengaruhi keberhasilan pelatihan kerja siswa, maka lingkungan industri harus memiliki keteraturan program pelatihan, memiliki perlengkapan belajar, keterampilan yang akan diberikan, waktu kerja, dan dapat membantu siswa dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja (dengan instruktur dan karyawan yang ada).

Dari uraian di atas, kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan seperti berikut:



Kerangka berpikir di atas, mengacu pada dasar pemikiran bahwa pendidikan bisnis sebagai komponen produktif pada sekolah kejuruan dapat mencapai optimal melalui pelaksanaan program praktik kerja industri dalam membentuk sikap kewirausahaan siswa yang akan memasuki dunia kerja. Dengan dasar kurikulum yang mengacu pada Pendidikan Sistem Ganda, maka optimalisasi pendidikan bisnis tersebut bisa terwujud dengan dukungan kerjasama antara manajemen sekolah (perencanaan, pengorganisasian, pengarahsan, dan pengawasan) dan manajemen perusahaan (industri) berkaitan dengan penunjukan instruktur dan persiapan lingkungan industri dalam mencapai tingkat kompetensi yang harus dikuasai siswa.

Pada akhirnya dari program pelatihan tersebut, diharapkan terbentuk kompetensi siswa yang dikatakan berkualitas, yang memiliki sikap kewirausahaan, yang mandiri, mampu dan tanggap dalam memasuki sektor industri bahkan dapat menciptakan lapangan kerja sendiri.

Adapun dalam keterkaitannya dengan Pendidikan IPS, kita tinjau dalam tujuan dari PIPS yang kita pahami sebagai bagian dari kurikulum sekolah yang mempunyai tanggung jawab dalam membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diperlukan dalam berpartisipasi di masyarakat, baik lokal, nasional, maupun internasional.

Persamaan tersebut di atas, menunjukkan bahwa antara pendidikan bisnis dan optimalisasinya melalui pelatihan kerja, dengan pendidikan IPS mempunyai tujuan pembelajaran yang sama namun dengan penekanan yang berbeda dalam prosesnya. Terpenting dari keduanya adalah membekali siswa dengan kompetensi yang dapat berguna demi masa depannya dalam memasuki dunia kerja. Sehingga

akhirnya yang diharapkan dari kedua tujuan tersebut adalah tercapainya penguasaan kompetensi perilaku. Untuk memasuki dunia kerja, kompetensi perilaku tersebut, bisa diwujudkan dengan terbentuknya kompetensi melalui penguasaan keterampilan, baik keterampilan yang berkaitan dengan profesi, maupun sosial kemasyarakatan.

Berhubungan dengan pelaksanaan program praktik kerja industri, maka pendidikan IPS berada pada proses pemberian pengarahan kepada siswa sebelum terjun ke lapangan, dan selama siswa tersebut melaksanakan praktik kerja yaitu pada saat siswa harus bersosialisasi dan berinteraksi dengan instruktur dan karyawan di dunia usaha (industri). Dengan kata lain, berada pada proses pembelajaran baik sebelum melaksanakan praktik maupun pada saat pelaksanaannya.